

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini ialah DPRD Komisi III Kabupaten Batanghari telah melaksanakan perannya dalam menangani masalah tambang minyak ilegal yang berdampak pada kerusakan lingkungan di Desa Bungku. DPRD Batanghari melakukan beberapa tahap dalam menentukan kebijakan dalam upaya menangani operasional tambang minyak ilegal antara lain yaitu:

1. Tahap *agenda setting*, dimana DPRD Batanghari dan pemerintah daerah melakukan rapat untuk menentukan kebijakan yang akan diambil dengan hasil dari rapat tersebut adalah Pemerintah Batanghari mengeluarkan surat keputusan Nomor 53 Tahun 2019 tentang “Pembentukan tim terpadu penanganan masalah sosial tingkat Kabupaten Batanghari tahun 2019”. Dan mengeluarkan Peraturan Daerah Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa.
2. Tahap mengadopsi kebijakan dan perumusan kebijakan pada saat rapat yang dilakukan dengan tahap *agenda setting* selanjutnya mementukan kebijakan yang akan diterapkan yaitu membentuk tim terpadu dari terdiri dari dinas Kesbangpol, pemerintah daerah, dan aparat kepolisian Batanghari.

3. Tahap implementasi, kebijakan hasil dari rapat yaitu adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pertambangan, Mineral dan Batubara. DPRD Kabupaten Batanghari melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Batanghari terhadap aktivitas tambang minyak ilegal. DPRD Batanghari meminta aparat kepolisian untuk melakukan penertiban di area tambang minyak ilegal dan melakukan penangkapan kepada oknum penambang minyak ilegal di Desa Bungku.

Melihat kegiatan tambang minyak ilegal di Desa Bungku hingga saat ini masih berjalan yang menyebabkan kerusakan lingkungan selanjutnya pemerintah daerah masih mencari upaya evaluasi kebijakan.

4. Tahap evaluasi kebijakan, Pemerintah Daerah berkoordinasi DPRD Kabupaten Batanghari dan OPD teknis tentang langkah-langkah penanggulangan aktivitas *illegal drilling* di Desa Bungku. Pemerintah daerah melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta berusaha untuk melibatkan masyarakat setempat dalam upaya penanggulangan ini agar mereka lebih memahami pentingnya menjaga lingkungan dan dampak negatif dari aktivitas ilegal tersebut.

Kebijakan yang diterapkan oleh DPRD Batanghari dan pemerintah daerah terkait pengelolaan tambang minyak ilegal masih berjalan, meskipun belum mencapai hasil yang diharapkan.

4.2 Saran

Peran DPRD Komisi III harusnya mengeluarkan regulasi yang lebih jelas dan tegas terkait pengelolaan sumber daya alam, khususnya mengenai izin dan operasional tambang minyak. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir praktik ilegal dan melindungi lingkungan. Diperlukan pengawasan yang lebih intensif terhadap aktivitas tambang ilegal. DPRD dan pemerintah daerah harus membentuk tim khusus yang secara rutin melakukan pemantauan di lapangan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Program edukasi tentang dampak negatif dari tambang minyak ilegal harus diperkuat. Pemerintah dan DPRD perlu bekerja sama dengan organisasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan lingkungan di kalangan penduduk Desa Bungku. DPRD dan pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang diterapkan untuk menangani tambang minyak ilegal.

